

Jurnal Skripsi

PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KINERJAKEUANGAN DENGAN MANAJEMENLABA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Oleh

Merin Syarah
14310615

ABSTRAK

Kinerja perusahaan merupakan suatu hasil dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Faktor non keuangan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor. *Good Coporate Governance* (GCG) merupakan faktor non keuangan yang saat ini banyak di pertimbangkan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan. Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Metode survey di gunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamia (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisisioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016 hingga 2017, dipilih periode 2016 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan diantaranya bahwa (1) ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (2) Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (3) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (4) Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (5) Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (6) Ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kata Kunci : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen,
Manajemen Laba, Kinerja Keuangan

I. Pendahuluan

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan. Namun terkadang dalam menjalankan perusahaan, manajer sebagai pengelola perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima, yang akan menyebabkan jatuhnya harapan investor tentang pengembalian (*return*) atas dana yang telah mereka tanamkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sistem yang menjembatani pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola di dalam suatu perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan suatu hasil dari sebuah perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Sesuai dengan tujuan awal perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir setiap perusahaan mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembandingan yang potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu ataupun dengan laporan keuangan perusahaan lain yang sejenis dan laporan keuangan juga sebagai tolok ukur perkembangan suatu perusahaan (Hansen dan Mowen, 2014).

Faktor non keuangan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan yang berdampak terhadap nilai perusahaan di mata investor. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan faktor non keuangan yang saat ini banyak dipertimbangkan oleh investor dalam menilai suatu perusahaan. Pelaksanaan GCG yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan

membuat investor merespon secara positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan pasar perusahaan. Implementasi *corporate governance* sendiri telah menjadi isu sentral bagi pelaku bisnis karena sudah menjadi tuntutan masyarakat dan bagian dari aturan-aturan serta regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan *corporate governance* yang baik. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang termasuk dalam memenangkan persaingan bisnis yang kian sengit.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu alat yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, sehingga penerapan GCG sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Dalam proses pencapaian kinerja yang baik, diperlukan fokus yang kuat pada fungsi dan tanggungjawab organ perusahaan. GCG diperlukan untuk mengendalikan perilaku organ perusahaan agar dapat menjalankan segala tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang semata-mata untuk perusahaan.

Penerapan GCG dapat diwujudkan dengan menjalankan segala tugas dan fungsi dari setiap organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta pihak-pihak lain yang membantu pelaksanaan penerapan GCG.

Dewan komisaris sebagai salah satu wujud dari penerapan GCG yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mengawasi perusahaan khususnya dalam memonitor aktivitas manajemen serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG. Dewan komisaris tidak berhak atas pengambilan

keputusan dalam operasi perusahaan, keputusan yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris yakni mengenai hal-hal yang telah diatur dalam anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan selama fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pengawas dan penasihat. Menurut KNKG (2012), dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Pada proses memaksimalkan nilai perusahaan tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utamanya. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham, maka idealnya mereka akan bertindak *on the best of interest of stockholders*, tetapi dalam praktek sering terjadi konflik. Konflik kepentingan antar agen sering disebut dengan *agency problem* (Agus,2014:21).

Konflik kepentingan tersebut dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme yang mampu mensejajarkan kepentingan pemegang saham selaku pemilik dengan kepentingan manajemen yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

Fenomena manajemen laba merupakan topik yang selama beberapa dekade terakhir ini sering muncul, baik dalam dunia akademik maupun bisnis. Penelitian telah menunjukkan bahwa manajemen laba semakin luas dan hampir ada dalam setiap pelaporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Karena

manajemen laba telah menjadi budaya perusahaan di seluruh dunia. Tidak hanya di negara dengan sistem bisnis yang sudah tertata, namun juga terdapat di negara dengan sistem bisnis yang sudah tertata, seperti halnya Amerika Serikat. Manajemen laba ini merupakan suatu permasalahan yang serius, karena rekayasa manajerial ini bisa merusak tatanan ekonomi, etika dan moral. Rekayasa manajerial menyebabkan publik meragukan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan.

Berdasarkan tujuan *good corporate governance* yaitu untuk mengurangi adanya tindakan manajemen laba, muncul harapan yang ingin diwujudkan dengan adanya sistem pengawasan dan pengendalian sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance*, yaitu menurunnya manajemen laba dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Terlebih secara empiris memang terbukti bahwa penerapan yang konsisten dari *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat meningkat karena penerapan yang konsisten dari *good corporate governance* dapat menghambat penyimpangan pada laporan keuangan, laporan keuangan yang menyimpang tidak menggambarkan nilai fundamental dari perusahaan.

Mekanisme *good corporate governance* membutuhkan suatu bentuk laporan konkrit yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Mekanisme *good corporate governance* memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba. Laporan keuangan harus menunjukkan informasi yang sebenarnya agar tidak menyesatkan pihak pengguna laporan (Boediono, 2015:172).

Perusahaan memiliki alat analisis keuangan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut melalui kinerja keuangannya, sehingga

dapat diketahui sebaik dan seburuk apa kondisi keuangan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan merupakan suatu keharusan, agar saham perusahaan menarik bagi investor. Biasanya para investor melakukan peninjauan dengan melihat rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi, dengan adanya rasio ini dapat memperlambat hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.

Salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah *return on assets* (ROA). ROA sendiri merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang digunakan tidak memberikan keuntungan. Oleh karena itu dengan semakin positifnya nilai ROA maka menunjukkan kinerja keuangan yang baik pula yang akan diikuti dengan meningkatnya harga saham dari perusahaan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan makanan yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, penulis menggunakan indikator mekanisme *good corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen. Penulis mengambil sampel pada perusahaan makanan karena merupakan perusahaan dalam taraf perusahaan besar yang menyokong perekonomian Negara.

II. Kerangka Teori

A. Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (business language). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas. Pengertian Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) (2012) adalah:

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan.

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Bidang akuntansi keuangan dilihat dari sisi pengguna informasi dibagi menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam

penulisan laporan akhir ini penulis berfokus pada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Penjelasan mengenai akuntansi keuangan menurut Martani (2012:8) adalah sebagai berikut:

Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).

B. Prinsip Dasar AkuntansiKeuangan

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK:2012) dijelaskan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu:

Prinsip Akuntansi yang berlaku umum merupakan suatu urutan atau hirarki ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan Akuntansi yang dapat disajikan sebagai acuan pencatatan suatu transaksi. Ketentuan-ketentuan tersebut biasanya disusun dari suatu pengaturan yang merupakan ketentuan Konseptual yang bersifat Filosofis hingga ketentuan yang bersifat praktis dan teknis.

C. Fungsi AkuntansiKeuangan

Menurut Martani (2012), Setiap sistem utama akuntansi akan melaksanakan lima fungsi utamanya yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen.

3. Memanage data-data yang ada kedalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
4. Mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga.

Merencanakan fungsi akuntansi keuangan pada suatu perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Kemudian perusahaan harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya, dirancang struktur organisasi dan sistem informasi akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai tersebut.

2.1.1 Laporan Keuangan

A. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi sebuah perusahaan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Menurut PSAK 1 (2015:1.3) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Kasmir (2013:7), Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pengertian laporan keuangan menurut Munawir (2012:5) adalah dua daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi-laba. Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).

Menurut Hanafi (2014:49), Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.

Menurut Harahap (2012:105), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses pencatatan akuntansi yang berakhir pada suatu periode yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Melalui laporan keuangan tersebut dapat diketahui informasi mengenai kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan.

B. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat perusahaan sangat bermanfaat bagi stakeholder. Stakeholder perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberi gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah di capai oleh perusahaan selama kurun waktu tertentu. Adapun menurut Sukardi dan Kurniawan (2012:187) tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Sebagai bahasa bisnis yang mudah dimengerti oleh semuapihak.
2. Menunjukkan logika hubungan timbal-balik antara pospos dalam laporan keuangan.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan dalam Fahmi (2012:6) tujuan laporan keuangan adalah

„Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi“.

Selanjutnya menurut Fahmi (2012:5) tujuan laporan keuangan adalah „memberi informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan Moneter“.

Menurut Kasmir (2015:10-11) adapun beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periodetertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periodetertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modalperusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporankeuangan.
8. Informasi keuanganlainnya.

C. Manfaat Laporan Keuangan

Selain tujuan laporan keuangan, laporan keuangan juga memiliki beberapa manfaat. Dimana menurut Martono dan Agus (2012:52) laporan keuangan yang baik dan akurat dapat memberi manfaat antara lain dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi
2. Keputusan pemberian kredit
3. Penilaian aliran kas
4. Penilaian sumber ekonomi
5. Melakukan klaim terhadap sumber dana
6. Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana
7. Menganalisis penggunaan dana

Kemudian menurut Sukardi dan Kurniawan (2012:187) manfaat laporan keuangan adalah:

1. Bagi manajemen
Sebagai dasar untuk memberi kompensasi.
2. Bagi pemilik perusahaan
Sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai perusahaan.
3. Bagi *Supplier*
Untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran hutang.
4. Bagi bank
Sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut likuid dan mempunyai cukup *Working Capital*.

Selanjutnya menurut Fahmi (2012:4) manfaat laporan keuangan adalah „untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya“.

D. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan merupakan ringkasan dari harta, kewajiban, dan kinerja operasi selama periode akuntansi tertentu. Pada umumnya laporan keuangan terdiri atas tiga hal utama, yaitu Neraca (*Balance sheet*), Laporan laba rugi (*income statement*), dan laporan perubahan modal (*statement of changes in capital*). Dalam perkembangannya

komponen laporan keuangan bertambah dengan satu laporan keuangan yaitu laporan arus kas (*cash flow*). Dimana menurut Gumanti (2012:103), Jenis laporan keuanganyaitu:

1. Neraca (*BacanceSheet*)

Meruoakan laporan tentang kekayaan dan kewajiban atau beban suatu perusahaan dalam suatu perusahaan tertentu.

2. Laporan laba-rugi (*IncomeStatement*)

Menunjukkan kinerja operasi suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu dan juga menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menjalankan kegiatan serta seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkankeuntungan.

3. Laporan perubahan modal (*Statement Of Changes InCapital*)

Menunjukkan berapa besar bagian atau porsi dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan yang diinvestasikan kembali ke perusahaan yang mempengaruhi besaran modal secara keseluruhan.

4. Laporan Arus Kas (*CashFlow*)

Menyajikan informasi tentang arus kas bersih dari tiga kegiatan utama di perusahaan, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari pendanaan, dan arus kas dari aktivitas investasi.

E. Sifat dan Keterbatasan LaporanKeuangan

Seluruh informasi yang diperoleh dan bersumber dari laporan keuangan pada kenyataannya selalu saja terdapat kelemahan, dan kelemahan tersebut dianggap sebagai bentuk keterbatasan informasi yang tersaji dari laporan keuangan tersebut. Adapun sifat dan keterbatasan laporan keuangan menurut PAI (Prinsip Akuntansi Indonesia) dalam Fahmi (2012:10) adalah

1. Laporan keuangan bersifat Historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yangtelahlewat.Karena,laporankeuangantidakdapatdianggapsebagai

satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi.

2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.
3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula menerapkan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta dan pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal itu tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan.
5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih yang paling kecil.
6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa dari pada bentuk hukumnya.
7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah teknis dan memakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarperusahaan.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

Menurut Kasmir (2015:16), ada beberapa keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, yaitu:

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarahnya (historis), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu.
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Misalnya dalam suatu peristiwa yang tidak menguntungkan selalu dihitung kerugiannya. Sebagai contoh harta dan pendapatan, nilainya dihitung dari yang paling rendah.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan kepada sifat formalnya.

2.1.2 Analisis Rasio Keuangan

A. Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Dalam menghindari masalah yang timbul didalam membandingkan perusahaan dengan ukuran yang berbeda yaitu dengan cara menghitung dan membandingkan Rasio-rasio keuangan. Di mana Rasio-rasio tersebut cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada diantara berbagai bagian informasi keuangan. Adapun pengertian analisis rasio keuangan menurut Ross, Westerfield, dan Jordan (2012:78) yang diterjemahkan oleh Yulianto, Yuniasih, dan Cristine yaitu:

„Hubungan yang dihitung dari informasi keuangan sebuah perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan“.

Sedangkan menurut Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2012:108) analisis rasio keuangan adalah

„Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masalah dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”.

Kemudian menurut Samryn (2012:409) analisis rasio keuangan adalah „Suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil simpulan bahwa analisis rasio keuangan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan.

B. Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Dengan menganalisis sebuah laporan keuangan akan didapatkan sebuah gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan. Adapun manfaat dengan digunakannya analisis rasio keuangan menurut Fahmi (2012:109) yaitu:

1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat penilaian kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Dapat dijadikan sebagai alat mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.

4. Bermanfaat bagi para kreditur digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokokjaminan.
5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *Stakeholder* organisasi.

Berdasarkan manfaat analisis rasio tersebut kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, besarnya hutang yang digunakan perusahaan apakah rasional atau tidak, dan perencanaan yang akan digunakan dalam investasi.

C. Jenis – Jenis RasioKeuangan

Secara garis besar ada empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage dan rasio profitabilitas (Rentabilitas). Keempat jenis rasio tersebut dijelaskan menurut Martono dan Agus (2012:53) adalah

1. Rasio Likuiditas (*LiquidityRatio*)

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Aktivitas (*ActivityRatio*)

Rasio aktivitas dikenal juga sebagai Rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya.

3. Rasio Leverage (*LeverageRatio*)

Rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang(pinjaman).

4. Rasio Profitabilitas (*ProfitabilityRatio*)

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

2.1.3 *Good Corporate Governance*

A. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Sutedi (2012:1), *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Daniri (2014:5), *good corporate governance* adalah struktur dan proses (Peraturan, Sistem, dan Prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Dalwai (2015:4) menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan peraturan yang ditegakkan melalui lembaga internal dan eksternal yang berbeda untuk menyelesaikan konflik keagenan dan melindungi kepentingan pemegang saham organisasi dimana berguna untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab dan akuntabel yang meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Menurut Tunggal (2013:149) *Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*shareholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Purwoko (2012:4), pengertian tentang *Corporate Governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada

serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *good corporate governance* (GCG) adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan didalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholders dan stakeholders yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

B. Sejarah Good Corporate Governance

Konsep *Corporate Governance* yang komprehensif mulai berkembang setelah kejadian *The New York Stock Exchange Crash* pada tanggal 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York, mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Di kala itu, untuk mengantisipasi permasalahan intern perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana “menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Yang dilakukan tidak hanya *window dressing* tetapi juga *financial engineering*. Lazimnya pada situasi kondisi bisnis yang kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (*irregularities*) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan *profiteering*, *commercial crime*, hingga *economic crime*.

Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendikiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai dari tokoh-tokoh di Inggris yang dipimpin oleh Sir Adrian Cadbury, yang pada saat itu sebagai Direktur Bank of England dan mantan COE Group Cadbury. Sejak terbitnya *Cadbury Code of Corporate Governance* pada tahun 1992, semakin banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan petunjuk teknis praktik *Good Corporate Governance*, antara lain ICGN (*International Corporate Governance Network*) yang mendorong *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengeluarkan *OECD Principles on Corporate Governance*. ICGN sangat berkepentingan dalam implementasi GCG, karena anggota mereka terdiri dari institusi dana pensiun dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang.

C. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut FCGI terdapat lima prinsip utama yang penting dalam *Corporate Governance* yaitu Keadilan (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Kemandirian (*Independency*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Purwoko (2012:5).

1. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan (*Fairness*) dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Hak-hak pemegang saham yang harus dilindungi menurut prinsip GCG menurut OECD yang terdiri dari hak-hak dasar pemegang saham dan hak untuk berpartisipasi.

a. hak-hak dasar pemegang saham meliputi hak untuk:

- i. memastikan metode registrasi saham yang dimiliki,
- ii. memindahtangankan saham-sahamnya,

- iii. memperoleh informasi secara teratur dan tepatwaktu,
 - iv. berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS,
 - v. memilih anggota Komisaris dan Direksi,
 - vi. memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. para pemegang saham mempunyai hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi yang cukup, mengambil keputusan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan fundamental perusahaan seperti perubahan otorisasi untuk penambahan saham dan transaksi yang luar biasa untuk mempengaruhi hasil penjualan,
- i. para pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam RUPS serta harus diberi informasi tentang aturan-aturan termasuk prosedur pemberian suara dalam pelaksanaan rapat-rapat pemegang saham,
 - ii. struktur permodalan dan peraturannya memungkinkan pemegang saham tertentu mendapatkan suatu tingkat pengendalian yang tidak seimbang dengan kepemilikan sahamnya harus diungkapkan,
 - iii. pasar untuk pengendalian perusahaan harus dimungkinkan untuk berfungsi secara efisien dan transparan,
 - iv. para pemegang saham, termasuk investor institusi harus mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaksanaan hak-haknya,

Selain hak-hak dasar di atas, *Good Corporate Governance* juga memastikan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yakni sebagai berikut:

- a. semua pemegang saham dengan tingkatan investasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama pula,
- b. transaksi orang dalam (*insider trading*) dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan orang dalam sendiri harus dilarang,

- c. anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta para manajer harus mengungkapkan setiap kepentingan yang berbentuk hutang atas transaksi atau juga hal-hal yang berpengaruh terhadap perusahaan.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang saham (*stakeholders*).

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka dan hal-hal yang menjadi hak pemegang saham untuk diketahui.

3. Kemandirian(*Independency*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Prinsip ini mengharuskan perusahaan menggunakan tenaga ahli dalam setiap divisi atau bagian dalam perusahaannya sehingga pengelolaan perusahaan dapat dipercaya. Prinsip ini juga mengharuskan perusahaan memiliki kebijakan intern dalam perusahaan yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Prinsip kemandirian harus dilaksanakan dengan baik agar perusahaan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak dari dalam ataupun dari luar perusahaan tidak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dalam mekanismekorporasi.

4. Akuntabilitas(*Accountability*)

Akuntabilitas (*Accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab jawab manajemen agar dalam mengelolaperusahaan dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap manajemen mengenai kinerja dan pencapaian target return bagi pemegang saham.

Beberapa karakteristik akuntabilitas yang berkaitan yaitu pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, senior manajemen, dan stakeholder:

a. pemegang saham memiliki karakteristik sebagaiberikut:

pemegang saham mayoritas yang memiliki kepentingan pengendalian di dalam perseroan harus menyadari tanggung jawab pada saat menggunakan pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara ataupun melaluicaralain. Pemegang saham minoritas jugamemiliki

tanggung jawab serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. dewan direksi memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) anggota dewan bertindak dengan dasar informasi yang lengkap, niat yang baik, penelitian yang cermat dan lebih mementingkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham,
- b) dewan harus memastikan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan kepentingan *stakeholder*,
- c) dewan harus dapat melaksanakan pertimbangan yang objektif tentang urusan perusahaan secara independent khususnya terhadap manajemen.
- d) dewan komisaris memiliki karakteristik sebagai berikut:
dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengatasi tindakan direksi dan memberi nasehat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Dewan komisaris juga harus memantau efektifitas GCG yang diterapkan perseroan dan bilamana diperlukan penyesuaian.
- e) senior manajemen yang terdiri dari:
 - a) akuntan manajemen,
 - b) audit internal,
 - c) manajer,
 - d) stakeholder (pihak yang berkepentingan).

5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*) berarti bahwa sebuah perusahaan harus memenuhi dan mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk di dalamnya pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenagakerjaan dan sebagainya. Artinya bahwa perusahaan merupakan bagian dari sebuah budaya sosial dan masyarakat sehingga sebuah perusahaan tidak tegak secara terisolasi dari berbagai kepentingan sosial-

budaya dan politik kelompok-kelompok lain (*stakeholder*). Sebuah perusahaan tidak hanya harus bertanggungjawab terhadap mereka yang berhubungan langsung dengan perusahaan, tetapi mereka juga tidak berhubungan secara langsung dengannya.

Mengembangkan suatu konsep piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Piramida ini terdiri atas empat tanggung jawab perusahaan.

- a. tanggung jawab ekonomis yaitu sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba.
- b. tanggung jawab legal maksudnya dalam mencapai tujuan untuk mencapai laba sebuah perusahaan harus menaati hukum.
- c. tanggung jawab etis artinya perusahaan berkewajiban menjalankan hak yang baik, benar dan adil.
- d. tanggung jawab filantropis yang mensyaratkan perusahaan untuk memberi kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup semua.

Dari prinsip-prinsip GCG di atas maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menerapkan GCG di dalam pengelolaannya akan selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham, memberikan informasi yang terbuka kepada semua pihak baik internal maupun eksternal serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Prinsip-prinsip GCG ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada dalam satu tingkatan, melarang praktik-praktik *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

D. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* antarlain:

1. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha.
2. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.
3. Meningkatkan iklim investasinasional.
4. Memperbesar keuntungan secara nasional dari sebuah usaha yang dikelola secara baik.

Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas dalam negeri ketika bersaing di pasar internasional.

E. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Good corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini. Penerapan *corporate governance* yang efektif dapat memberikan sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan (misalnya direksi), akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Selain itu, *corporate governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan), dan lebih transparan dan akan

meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

Menurut IICG The IICG (2012:4), Penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menjaga *sustainability* (ketersinambungan) perusahaan.
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
3. Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*.
4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan terhadap *stakeholders*.
5. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
6. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.

Dengan melaksanakan *Corporate Governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Meminimalkan *agency cost*, selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari penelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Meminimalkan *cost of capital*, perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan, suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat nilai perusahaan, citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citratersebut.

Penerapan *Corporate Governance* yang efektif dapat memberikan kontribusi yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari krisis dan dan kegagalan serupa di masa depan, sebaliknya *Corporate Governance* yang tidak efektif merupakan penyebab terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada perusahaan-perusahaan.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung dari tumbuh kembangnya perusahaan dalam era persaingan global saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor, hal ini tentunya menjadi nilai tambah perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan usaha dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

2.1.4 Ukuran Dewan Komisaris

A. Pengertian Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepadadireksi.

Menurut Sembiring (2015), Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

B. Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer (Pangestu dan Munggaran,2014). Ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris

2.1.5 Proporsi Komisaris Independen

A. Pengertian Proporsi Komisaris Independen

Menurut Widjaja (2012:79), Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris independen menurut Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Menurut KNKG (2012) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Menurut Agoes dan Ardana (2014:110), Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

B. Pengukuran Proporsi Komisaris Independen

Menurut Djuitaningsih (2012) pengukuran proporsi komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Proporsi komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.”

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.1.6 KinerjaKeuangan

A. Pengertian KinerjaKeuangan

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat tergantung dari kinerja perusahaan dan manajer perusahaan didalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Menurut Fahmi (2012:239), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alatalat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahanlingkungan.

Menurut Kasmir (2012:196), hasil pengukuran kinerja keuangan adalah hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak.

Menurut Sucipto (2012), kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang. Banyak batasan yang diberikan para ahli mengenai istilah kinerja, walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun secara prinsip kinerja adalah mengenai proses pencapaian hasil.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis untuk melihat sejauh manaperusahaan

melaksanakan keuangan yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2012:31), tujuan penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

C. Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut Munawir (2012:31), manfaat penilaian kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

2. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

D. Tahap – Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2012:240), tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum terdapat 5 (lima) tahap yaitu:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan Perhitungan

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu:

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.

b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara suatu perusahaan dan perusahaan lainnya didalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut baru selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

E. Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mahmud dan Halim (2013:75), Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja perusahaan. Rasio keuangan dirancang untuk mengevaluasi keuangan, yang berisi data tentang posisi perusahaan pada suatu titik dan operasi perusahaan pada masa lalu. Nilai nyata laporan keuangan terletak pada fakta bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu

memperkirakan pendapatan dan dividen masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan merupakan permulaan masa depan bila dilihat dari sudut pandang investor, sedangkan bagi manajemen bermanfaat untuk membantu mengantisipasi kondisi mendatang dan menjadi titik awal perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian mendatang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam meraih laba pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya (Wibisono, 2012:36). Hal ini penting karena untuk menilai suatu keberhasilan perusahaan. Para investor biasanya sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas penggunaan modalnya.

Sedangkan menurut Anoraga (2012:300), profitabilitas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu yang diperoleh dari penjualan ataupun aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan diketahuinya profitabilitas, perusahaan dapat menentukan kebijakan strategis baik dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan laba maupun untuk penentuan keputusan investasi perusahaan. Ada beberapa bentuk rasio profitabilitas, salah satunya yaitu *Return On Assets (ROA)*.

Menurut Wibisono (2012:37), *Return On Assets (ROA)* adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang menghubungkan laba bersih dengan total aktiva dan mengukur tingkat profitabilitas perusahaan atas penggunaan

aktivanya. Rasio ini dipilih karena ROA mengukur kemampuan manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang tersedia dan mempunyai hubungan yang erat dengan modal kerja dimana modal kerja bersih secara sederhana dapat diartikan sebagai aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Semakin tinggi *Return On Assets* (ROA), maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{LabaSetelahPajak}}{\text{TotalAsset}} \times 100\%$$

2.1.7 Manajemen Laba

A. Pengertian ManajemenLaba

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

Menurut Islahuzzaman (2012:257), Manajemen Laba adalah proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba, dimana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi.

Menurut Scott (2012:344), Manajemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan *accrual* dalam menyusun laporan keuangan.

Menurut Fahmi (2013:279), *Earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindakan *earnings management* sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya.

Menurut Sri Sulistyanto (2012:6), Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen laba adalah suatu penyusunan laporan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditujukan pada pihak eksternal dengan cara meratakan, menaikkan dan menurunkan laporan laba untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

B. Bentuk – Bentuk ManajemenLaba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:33) ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan pihak manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki,yaitu:

1. Taking a Bath

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan bila kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meski kondisi sedang tidak menguntungkan.

2. IncomeMinimization

Cara ini hampir sama dengan taking a bath namun tidak ekstrim. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud

mengurangi kemungkinan munculnya biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, serta pembebanan biaya riset.

3. *Income Maximization*

Maksimalisasi laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Perusahaan cenderung lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Perataan laba dapat dicapai dengan suatu ketentuan yang tinggi untuk hutang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik sehingga ketentuan itu dapat dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan pada masa yang buruk.

5. *Timing Revenue and Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

C. Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan earnings management. Menurut Fahmi (2013:279) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan berani melakukan earnings management (manajemen laba) yaitu:

1. "Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti menggunakan

metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.

2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat menggunakan judgment dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pendapatan.”

Faktor lain timbulnya manajemen laba adalah hubungan yang bersifat asimetri informasi yang pada awalnya didasarkan karena *conflict of interest* antara agent dan parsial. Agent adalah manajemen perusahaan (internal) dan parsial adalah komisaris perusahaan (eksternal). Pihak parsial disini adalah tidak hanya komisaris perusahaan, tetapi juga termasuk kreditur, pemerintah dan lainnya.

D. Motivasi Manajemen Laba

Sri Sulistyanto (2012:63) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. Bonus Scheme Hypothesis

Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai target laba minimal tertentu dan bonus maksimal dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. Contracting Incentive

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas

berada di bawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer(CEO)*

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering(IPO)*

Perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go publik melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

E. Pendekatan Manajemen Laba

Pada umumnya pendeteksian manajemen laba dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *accruals*. Pendekatan ini akan menggunakan pengukuran berbasis akrual (*accrual based measures*) dalam mendeteksi ada tidaknya manipulasi. Menurut Sri Sulistyanto (2012:211) yaitu:

1. Model berbasis *Aggregate Accrual*

Model berbasis *Aggregate Accrual* yaitu Model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba.

2. Model Berbasis *Spesific Accruals*

Model Berbasis *Spesific Accruals* yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi.

3. Model Berbasis *Distribution Of Earning After Management*

Pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.

F. Indikator Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto (2012:165) manajemen laba dapat diukur dengan *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit. *Discretionary accrual* dapat dihitung melalui beberapa langkah sebagai berikut :

1. terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Secara sistematis, total *accruals* untuk periode tes dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$TA = NI - CFO$$

Keterangan :

TA : total akrual

NI : Laba Bersih

CFO : Arus Kas dari Operasi

Nilai total akrual diperoleh dari selisih antara Laba Bersih dan Arus kas dari operasi. Laba bersih diperoleh dari laporan laba rugi dan arus kas dari operasi diperoleh dari laporan arus kas.

2. Menentukan Nilai Δ Sales dan Δ REC

$$\Delta\text{Sales} = \text{Penjualan Tahun } t - \text{Penjualan } t-1$$

$$\Delta\text{REC} = \text{Piutang } t - \text{Piutang } t-1$$

Δ Sales diperoleh dari selisih penjualan tahun tes dengan penjualan tahun sebelumnya. Sedangkan Δ REC diperoleh dari selisih piutang tahun tes dengan piutang tahun sebelumnya. Nilai penjualan diperoleh dari laporan laba rugi dan piutang diperoleh dari laporan posisi keuangan.

3. Menentukan Parameter β_1 β_2 β_3

β_1 β_2 β_3 yang dihitung dengan persamaan regresi linear berganda yang berbasis Ordinary least square (OLS) sebagai berikut:

$$TA/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta\text{Sales}/A_{it-1}) + \beta_3(\text{PPE}_{it}/A_{it-1}) + e$$

Keterangan :

TA/A_{it-1} = Total Akrual/total aset tahun sebelumnya

$1/A_{it-1}$ = 1/ total aset tahun sebelumnya

$\Delta\text{Sales}_{it}/A_{it-1}$ = Perubahan Penjualan/ total aset tahun sebelumnya

PPE_{it}/A_{it-1} = Aset tidak lancar/ total aset tahun sebelumnya

Untuk mendapatkan β_1 β_2 β_3 yang diperoleh dari hasil regresi TA/A_{it-1} digunakan sebagai variabel Y, $1/A_{it-1}$ digunakan sebagai variabel X1,

$\Delta\text{Sales}/\text{Ait-1}$ digunakan sebagai variabel X2 dan $\text{PPEit}/\text{Ait-1}$ digunakan sebagai variabel X3.

4. Setelah mendapatkan nilai β_1 β_2 β_3 , langkah selanjutnya adalah menghitung Nondiscretionary accrual. Nondiscretionary accrual akan diukur dengan menggunakan persamaan:

$$\text{NDAit} = \beta_1(1/\text{Ait-1}) + \beta_2(\Delta\text{Sales}/\text{Ait-1} - \Delta\text{REC}/\text{Ait-1}) + \beta_3(\text{PPEit}/\text{Ait-1})$$

Keterangan :

NDAit = Nondiscretionary Accrual perusahaan pada periode t

$\beta_1\beta_2\beta_3$ = Koefisien regresi

Ait-1 = Total Asset tahun sebelumnya

ΔSales = Perubahan Penjualan t-1 ke tahun t

ΔREC = Perubahan Piutang dari tahun t-1 ke tahun t

PPEit = Aset tetap pada perusahaan i pada periode t

5. Setelah mendapat nilai Nondiscretionary accrual maka discretionary accrual (DAC) dihitung dengan cara mengurangkan $\text{TA}/\text{Ait-1}$ terhadap NDAit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DAC} = \text{TA}/\text{Ait-1} - \text{NDAit}$$

Keterangan :

DAC = Discretionary accrual

$\text{TA}/\text{Ait-1}$ = total akrual/total Asset tahun Sebelumnya NDAit = Nondiscretionary accrual

III. Metode Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang berupa angka / bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti (Deni Darmawan, 2014:296).

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Deni Darmawan (2014:296), "Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari semua sumber yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya buku materi, laporan dan sebagainya.

3.1.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa angka-angka yang diperoleh melalui hasil perhitungan rasio keuangan perusahaan makanan dan minuman dari laporan keuangan (*annually report*) tahunan perusahaan manufaktur periode 2016-2017 yang di unduh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data penelitian disajikan dalam bentuk *time series* (antar waktu).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian untuk memperoleh data terbaru berdasarkan data yang telah ada. Data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan *time series*, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2016-2017 yang di unduh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data penelitian disajikan dalam bentuk *time series* (antar waktu).
2. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan teori-teori, konsep-konsep serta pendapat beberapa ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penelitian sekarang. Teori-teori, konsep-konsep maupun pendapat orang ahli diperoleh dari buku-buku, jurnal dan jurnal yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk menguji data. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan, metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini adalah *statistic deskriptif* (seperti mean dan deviasi standar) yang berguna untuk mengetahui karakteristik dari perusahaan yang dijadikan sampel serta *statistic inferensi* yaitu berupa pengujian *multivariate* dengan menggunakan analisis logistic regresi program SPSS statistic.

3.3.1 Analisis Deskriptif

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.3.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independen) dalam satu model. Hubungan inilah yang disebut multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya, VIF (*variance inflation factor*). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $> 0,10$ dengan nilai VIF < 10 .

2. Uji Heterokedastisitas

Tujuan uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas,

dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas yang berarti tidak terjadi heterokedastisitas.

Penelitian ini menggunakan metode chart (diagram scatterplot). Analisis pada diagram scatterplot yang menyatakan model regresi linear berganda ini tidak terdapat heterokedastisitas jika:

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
- b. Titik-titik data tidak menyebar hanya diatas atau dibawah saja.
- c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik-titik tidak berpola.

3. Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu (t) dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Secara umum dapat diambil patokan sebagai berikut:

- a. Angka Durbin Watson (D-W) dibawah -2 berarti ada autokorelasi.
- b. Angka Durbin Watson (D-W) diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c. Angka Durbin Watson (D-W) diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

3.3.3 Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau dengan kata lain analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013:249). Analisis jalur hanya digunakan untuk menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat

digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner, Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan structural, yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dua persamaan tersebut sebagai berikut:

Sub structural 1 (X ke Z)

$$Z = \beta_{ZX1} + \beta_{ZX2} + E1$$

Sub structural 2 (X, Z, ke Y)

$$Y = \beta_{YX1} + \beta_{YX2} + \beta_{YZ} + E2$$

Keterangan :

B = Nilai Koefisien Standardized Beta

Untuk menentukan pengaruh intervening / mediasi yang terjadi bersifat signifikan atau tidak, diperlukan uji sobel. Analisis jalur akan menghasilkan koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel-variabel penelitian. Besarnya pengaruh langsung ditunjukkan dengan angka koefisien keluaran dari SPSS sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien dari dua struktural. Untuk mengetahui pengaruh intervening / mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien signifikan atau tidak, maka dilakukan uji sobel. Uji sobel dilakukan dengan cara :

Hitung standart error dari koefisien *indirect effect* (S_{p1p3}) dengan rumus :

$$Sp1p3 = \sqrt{p3^2 Sp1^2 + p1^2 Sp3^2 + Sp1^2 Sp3^2}$$

(Ghozali, 2013:255)

Berdasarkan hasil perhitungan dari S_{p1p3} , selanjutnya dapat dihitung nilai t statistik pengaruh intervening / mediasi dengan rumus :

$$t = \frac{p1p3}{Sp1p3}$$

(Ghozali, 2013:255)

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh intervening / mediasi yang signifikan.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan nilai sig $\alpha = 0.05$.

Untuk menguji signifikansi digunakan uji t menurut Siregar (2013:387) dengan rumus sebagai berikut :

$$T_{hitung} = \frac{\sqrt{r}}{\sqrt{n}}$$

Keterangan :

r = Nilai Korelasi

n = Jumlah Responden

Langkah – langkah pengambilan keputusannya adalah dengan menentukan daerah keputusannya, yaitu daerah dimana hipotesis nol (H_0) diterima atau tidak. Untuk mengetahui kebenaran hipotesis digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Kriteria pengujian hipotesis uji t menurut Rusman (2014:80) adalah sebagai berikut :
- Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ dan $\alpha > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Kriteria pengujian hipotesis uji t menurut Rusman (2014:80) adalah sebagai berikut :
- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan $dk = n-2$ dan $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.4.2 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Dengan tingkat kepercayaan (α) untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)=0,05.

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu :

- a. Apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
Artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
Artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.4.3 Uji R²

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R² mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar nilai R² (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut. Dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Sulaiman, 2014:86).

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai 0,001 dan bernilai negatif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba

adalah negatif. Koefisien regresi sebesar 0,001 berarti setiap kenaikan ukuran dewan komisaris sebesar 1 satuan akan menurunkan manajemen laba sebesar 0,001 satuan. Hasil pengujian parsial (uji t) antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba menunjukkan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,095 < 2,04523$) dan nilai signifikansi sebesar 0,925 yang artinya nilai signifikansinya diatas 0,05. Hal

ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel ukuran dewan komisaris secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sehingga dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

4.1.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai 0,003 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba adalah positif. Koefisien regresi sebesar 0,003 berarti setiap kenaikan proporsi komisaris independen sebesar 1 satuan akan meningkatkan manajemen laba sebesar 0,003 satuan. Hasil pengujian parsial (uji t) antara proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,721 < 2,04523$) dan nilai signifikansi sebesar 0,097 yang artinya nilai signifikansinya di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel proporsi komisaris independen secara signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai

Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sehingga dapat dikatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki kemampuan mengendalikan manajemen untuk meminimalisir praktik manajemen laba. Besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak dapat menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, namun tergantung pada efektivitas pengendalian melalui nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jennings (2005) dalam Agustia(2013).

4.1.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai 0,901 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan adalah positif. Koefisien regresi sebesar 0,901 berarti setiap kenaikan ukuran dewan komisaris sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,901 satuan. Hasil pengujian parsial (uji t) antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan menunjukkan t hitung $<$ t tabel ($0,756 < 2,04523$) dan nilai signifikansi sebesar 0,456 yang artinya nilai signifikansinya diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel ukuran dewan komisaris secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukurandewan

komisaris tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Menurut Peraturan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Fungsi dan Tanggungjawab Dewan Komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga dewan komisaris tidak berhak atas pengambilan keputusan dalam menilai kinerja perusahaan, keputusan yang dapat dilakukan oleh dewan komisaris yakni mengenai hal-hal yang telah diatur.

4.1.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai 0,722 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan adalah positif. Koefisien regresi sebesar 0,722 berarti setiap kenaikan proporsi komisaris independen sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,722 satuan. Hasil pengujian parsial (uji t) antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan menunjukkan t hitung $>$ t tabel ($2,993 > 2,04523$) dan nilai signifikansi sebesar 0,006 yang artinya nilai signifikansinya dibawah 0,05. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh variabel proporsi komisaris independen secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Fildzah Fitria (2015) dengan judul "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hal ini terkait dengan fungsi dari komisaris independen, yakni melakukan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pemecatan terhadap manajer puncak (KNKG,

2012). Serta peranan komisaris independen pada perusahaan adalah obyektif yakni tidak terikat oleh kepentingan dan pihak manapun. Jika proporsi komisaris independen ditambah didalam komposisi dewan komisaris maka pengawasan terhadap manajemen dan dewan direksi serta laporan keuangan perusahaan juga akan semakin ketat dan obyektif. Sehingga manajemen akan selalu bertindak sesuai tujuan perusahaan. Ketika proporsi dewan komisaris ditambah maka akan menaikkan kinerja perusahaan. Ketika kinerja perusahaan naik, maka penilaian pasar terhadap aktiva perusahaan juga akan naik. Hal ini akan menarik keinginan investor untuk memiliki sahamtersebut.

4.1.5 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai 2,334 dan bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel manajemen laba terhadap kinerja keuangan adalah positif. Koefisien regresi sebesar 2,334 berarti setiap kenaikan manajemen laba sebesar 1 satuan akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 2,334 satuan. Hasil pengujian parsial (uji t) antara manajemen laba terhadap kinerja keuangan menunjukkan $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($0,078 < 2,04523$) dan nilai signifikansi sebesar 0,938 yang artinya nilai signifikansinya diatas 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel manajemen laba secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Roychowdhury (2013) mengatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan dengan cara manipulasi akrual murni (*accrual earnings management*).

Hal ini dilakukan melalui *discretionary accrual* atau dengan cara manipulasi aktivitas riil (*real earnings management*). Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa, sehingga dapat mengetahui berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. Namun, manipulasi akrual dibatasi oleh GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan manipulasi akrual di tahun-tahun sebelumnya.

Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu ROA merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan dalam kategori *cash flow measures* yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. *Cash flow measure* ini menunjukkan hasil yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Praduhono, 2014). Hal inilah yang kemungkinan menyebabkan besar kecilnya manajemen laba yang dilakukan tidak akan berpengaruh pada kinerja keuangan yang diwakilkan ROA. Kemungkinan akan berbeda hasilnya jika kinerja keuangan diproyeksikan oleh *return on equity* (ROE) dan *net interest margin* (NIM).

Tidak berpengaruhnya manajemen laba terhadap kinerja keuangan ini membuktikan bahwa tindakan manajemen laba tidak serta merta dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang makanan dan minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak melakukan manajemen laba tidak akan memberikan perbedaan. Hal ini menunjukkan meskipun manajemen laba memiliki kecenderungan yang positif namun ternyata tidak dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan secara nyata. Sehingga, praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak

dalam bidang makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tidak perlu dikhawatirkan namun perlu untuk dilakukan antisipasi.

4.1.6 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan dengan variabel Manajemen Laba sebagai variabelintervening

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba sebagai variabel intervening. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai $-0,00826$ lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar $2,04523$ maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi $-0,241925$ tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi. Berdasarkan data hasil perhitungan dan beberapa tahapan di atas maka dapat diketahui bahwa hipotesis keenam tidak terbukti dan **ditolak**. Artinya tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memediasi pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implikasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari tujuan perusahaan.

4.1.7 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan dengan variabel Manajemen Laba sebagai variabelintervening

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan melalui manajemen laba sebagai variabel intervening. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 0,07399 lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,04523 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,0946 tidak signifikan yang berarti tidak terdapat pengaruh mediasi. Berdasarkan data hasil perhitungan dan beberapa tahapan di atas maka dapat diketahui bahwa hipotesis keenam tidak terbukti dan **ditolak**. Artinya tidak terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Akhmad Afnan (2014) dengan judul "Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Proporsi Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak memediasi pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan.

Fama dan Jensen (1983) dalam Pramuka dan Ujiyantho (2007) menyatakan bahwa Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan bertugas untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Sehingga semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin rendah pula kinerja keuangan perusahaan.

V. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
6. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI).

7. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).